

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rumokoy Donald. 2011. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia : Kajian Perbandingan di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda*. Jakarta : Media Prima Aksara.
- Ali, Zainuddin M.A. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Apeldoorn, Van. 1983. terjemahan Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. cetakan ke-21. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Bhuna Ilmu Populer.
- _____. 2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Universitas Indonesia.
- Ayunita, Kheldan dan Abd. Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Basah, Sjachran. 2012. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- _____. 1980. *Ilmu Negara*. Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busroh. 1983. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dicey, A.V. 1967. *An Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. London : EL and S and Macmillas.
- Hamid A. S. Attamimi. dkk. 1996. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta : BP – 7 Pusat Editor : Oetojo Oesman dan Alfian

- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans . 1995. *Teori Hukum Murni*, Alih Bahasa Soemardi. Rindi Press.
- _____. 1961. *General Theory of Law and State*. New York : Russel and Russel).
- Kusnardi, M. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti.
- _____. dan Harmaily Ibrohim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
- Manan, Bagir. 2006. *Konvensi Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- _____. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung : Mandur Maju.
- Mangunsong, Parlin M. 1992. *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan Undang-Undang Dasar*. Bandung : Alumni.
- MD, Mahfud. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta : Rajawali Press.
- _____. 1999. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta : UII-Press.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, Marsillam. *Pandangan Negara Intergralistik*. Jakarta : Grafiti.
- Simorangkir, J.C.T. 1983. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Soemantri, Sri. *Konvensi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. dimuat dalam *Bunga Rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. 1987. Yogyakarta : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Soemantri, Sri. 2006. *Prosedure dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung : Bandung Alumni.
- _____. *Konstitusi Serta Artinya Untu Negara*. dimuat dalam Padmo Wahjono. 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1979. *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soebagio, M. 1976. *Aneka Masalah Hukum Tata Negara R.I*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.
- Sunny, Ismail. 1986. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta : Aksara Baru.
- Suteki dan Galang. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok : Rajawali Pers.
- Thaib, Dahlan, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. 2006. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Van Apeldoorn, I. J. 1973. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Wheare, K.C. 1975. *Modern Constitutions*. London : Oxford University Press.

Jurnal dan Makalah Ilmiah

- Arbani, Tri Suhendra. 2016. “*Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*”. *Supremasi Hukum* Volume 5, Nomor 1.
- Agung, Muhammad. “*Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Hukum Formil Dan Materil*”. Makalah Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti.
- D.Redmond, P.W. 1984. *General Principles of English Law*, resived by. J.P.Price and I.N.Stevens, Fifth Edition, Mcdonald and Evans, Playmounth.
- J.Mesitte, Judge Peter. “*Common Law V. Civil Law Systems*”. http://web.ntpu.edu.tw/~markliu/common_v_civil.pdf
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2019. “*Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi*”. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 8, Nomor 1
- Mustaghfirin, H. 2011. “*Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*”. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Pak-kwan Chau and Cheung Wai-lam. 2002. *Process of Appointment of Senior Members of Government in Selected Countries*. HK : Legislative Council Secretariat.

Suprijatna, Dadang. 2009. Jurnal *“Hukum Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi di Indonesia”*, Bogor : Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda.

Weldy Agiwinata, 2014. Jurnal, *“Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Penguji Undang-undang di Mahkamah Konstitusi”*, Konvensi Ketatanegaraan, Vol 29, No. 2, Mei-Agustus.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) Jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Mengatur Hal Permohonan Grasi Dengan Menarik Kembali Segala Peraturan Mengenai soal ini yang Sampai Kini Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009

Putusan MK Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Internet

Alrasid, Harus. *Jika Presidein Istirahat (catatan hukum)*. Harian Kompas, 13 Januari 1998. diakses pada tanggal 21 November 2021.

Aritonang, Deytri Robekka. *Presiden Jilat Ludah Sendiri dengan Angkat Patrialis Jadi Hakim MK*. Kompas.com, 11 Agustus 2013. diakses 19 Januari 2022.

Tuan, Betrik. Modul 5 *Konvensi Ketatanegaraan*. Academia.edu. Hlm. 88. diakses pada tanggal 21 November 2021.

Sudardi. *"Materi Kuliah Hukum Tata Negara"*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Semarang. diakses pada tanggal 25 November 2021.